

ANALISIS KAUSALITAS *SHOCK* HARGA MINYAK DUNIA, PENGELUARAN DAN PENERIMAAN PEMERINTAH DI INDONESIA

Yulfia Mailida, Zul Azhar, Melti Roza Adry

Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Jl. Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang

yulfiamailida@gmail.com, Zulazhar.unp@gmail.com

meltirozaadry@gmail.com

Abstract: *This study aims to know and analyze the causality between oil world price, government expenditure and government revenue in Indonesia, which is analyzed using Vector Error Correction Model (VECM) method. The result of this study indicate oil world price and government expenditure have a causality in Indonesia, oil world price do not have a causality government revenue in Indonesia and government expenditure in Indonesia do not have causality government expenditure in Indonesia. Based on the result of this study it can be concluded that there have two variabel a causality.*

Keywords: *Oil World Price; Government Expenditure; Government Expenditure, VECM*

Abstrak: *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa hubungan kausalitas antara harga minyak dunia, pengeluaran pemerintah dan penerimaan pemerintah di Indonesia, yang dianalisis menggunakan metode Vector Error Coreection Model (VECM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa harga minyak dunia memiliki hubungan kausalitas dengan pengeluaran pemerintah di Indonesia, harga minyak dunia tidak memiliki hubungan kausalitas maupun hubungan satu arah dengan penerimaan pemerintah di Indonesia dan Penerimaan pemerintah di Indonesia tidak memiliki hubungan kausalitas maupun hubungan satu arah dengan pengeluaran pemerintah di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat dua variabel yang memiliki hubungan kausalitas.*

Kata kunci: *Harga Minyak Dunia; Pengeluaran Pemerintah; Penerimaan Pemerintah; VECM.*

Fluktuasi harga minyak memberikan pengaruh yang sangat vital pada aktivitas makroekonomi, karena minyak merupakan salah satu energi utama yang digunakan untuk kegiatan produksi barang dan jasa. Salah satu faktor yang menjadi penyebab harga minyak selalu naik adalah pengaruh ekspektasi pelaku pasar yang menganggap bahwa komoditas ini akan menjadi barang yang sangat langka dimasa mendatang dan juga diikuti dengan tindakan mengambil keuntungan.

Kenaikan harga minyak memiliki pengaruh dua sisi terhadap anggaran pemerintah, disatu sisi meningkatkan penerimaan pemerintah dari permintaan minyak dan disatu sisi yang lain akan meningkatkan beban subsidi dari

pengeluaran pemerintah. Dampak yang ditimbulkan oleh kenaikan harga minyak mentah dunia akan mempengaruhi beban fiskal (defisit anggaran) karena Indonesia memberikan subsidi untuk konsumsi minyak domestik.

Penelitian yang dilakukan oleh Dizaji (2014) mengemukakan bahwa guncangan harga minyak, penerimaan dan pengeluaran pemerintah memiliki hubungan yang sensitif dengan mempertimbangkan variabel makroekonomi dengan jelas. Hal ini sejalan dengan fenomena yang terjadi di Indonesia setiap guncangan yang terjadi pada harga minyak sangat mempengaruhi penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang memiliki efek langsung pada perekonomian suatu negara.

Sedangkan Ginting (2010) menemukan bahwa penerimaan dan pengeluaran pemerintah memiliki hubungan kausalitas jangka panjang, dimana peningkatan pengeluaran pemerintah akan mendorong meningkatnya penerimaan pemerintah.

Setiap variabel makroekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, suku bunga, SBI, dan harga minyak dunia memberikan kontribusi dalam APBN, tetapi dalam jangka panjang variabel yang paling memberi kontribusi terbesar dalam APBN adalah harga minyak dunia dan nilai tukar (Rosit, 2010). Pergerakan harga minyak dunia sangat berpengaruh terhadap APBN karena akan menimbulkan deviasi besar-besaran terhadap komponen pendapatan, belanja maupun pembiayaan dalam APBN.

Selanjutnya Farzanegan (2011) menemukan pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap guncangan harga minyak. Meningkatnya pengeluaran pemerintah akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendorong subsidi harga minyak dengan penurunan harga komoditas.

Selain itu, Putra (2016) menemukan pengeluaran pemerintah memiliki hubungan yang positif dengan pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan PDB, karena pertumbuhan ekonomi merupakan representasi dari peningkatan pendapatan nasional dalam persen sehingga pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu peningkatan atau penurunan pengeluaran pemerintah akan menyebabkan kenaikan atau penurunan laju pertumbuhan ekonomi.

Secara tidak langsung peningkatan atau penurunan harga minyak akan mempengaruhi pengeluaran pemerintah, ketika harga minyak mengalami *Shock* akan mempengaruhi kondisi keuangan suatu negara terutama negara yang bertindak sebagai pengimpor, pemerintah akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan BBM untuk kegiatan produksi sehingga menambah pengeluaran pemerintah yang ditandai dengan defisitnya APBN (Kilian, 2009).

Sementara itu kasus yang terjadi di Indonesia menemukan pada tahun 2008 harga minyak dunia mengalami peningkatan sebesar 36,39 persen atau mencapai 96.99 USD/barel. Hal ini diakibatkan adanya gangguan pasokan minyak mentah dari negara pengekspor dan meningkatnya permintaan global yang terus menerus serta bergejolaknya perang saudara yang terjadi di Libya yang menjadi produsen minyak terbesar di Afrika, penerimaan pemerintah ikut naik sebesar 38.68 persen, namun disamping itu pengeluaran pemerintah juga ikut naik karena naiknya harga minyak dunia menyebabkan belanja pemerintah terutama dalam

subsidi bahan bakar, meningkatnya pengeluaran pemerintah yang tidak diiringi dengan penerimaan pemerintah akan menyebabkan defisitnya APBN suatu negara.

Namun pada tahun 2012 harga minyak bumi mengalami penurunan sebesar 0.86 persen karena adanya penurunan pasokan komoditi ekspor di pasar global sedangkan penerimaan pemerintah meningkat sebesar 0.1 persen dan pengeluaran pemerintah mengalami kenaikan sebesar 35,72 persen dari tahun sebelumnya.

Selain itu, pada tahun 2014 harga minyak dunia menurun sebesar -7.53 persen, penerimaan pemerintah meningkat sebesar 7.75 persen sedangkan pengeluaran pemerintah meningkat sebesar 2,56 persen hal ini disebabkan oleh berlebuhnya pasokan minyak mentah dunia karena Amerika melakukan revolusi energi yang membanjiri produksi minyak, menyebabkan Arab Saudi kehilangan pangsa pasarnya menyebabkan harga minyak jatuh pada semester III pada tahun 2014. Penurunan harga minyak berakibat pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi negara industri maju. Hal ini juga berakibat pada kesehatan perekonomian negara sedang berkembang, baik negara pengekspor minyak maupun mengimpor minyak (Hernawan, 2008:4)

Selanjutnya pada tahun 2016 sampai tahun 2017 kondisi APBN Indonesia mengalami peningkatan harga minyak dunia sebesar 23.33 persen, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi (BKF) Kementrian Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Adrianto menekankan harga minyak sangat dipengaruhi oleh kondisi global, adanya konflik geo politik di Suriah mendorong pergerakan minyak dunia, secara keseluruhan naiknya harga minyak berdampak positif terhadap penerimaan pemerintah dan surplus APBN.

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang sejalan dengan kasus di Indonesia yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ratnah (2015:8) menunjukkan bahwa pengaruh harga minyak dunia terhadap kondisi APBN, secara langsung harga minyak dunia akan berpengaruh positif dengan defisit APBN seiring dengan naiknya harga minyak dunia, pemerintah harus tetap memenuhi kebutuhan minyak negaranya dan pemerintah harus menyuntikkan anggaran untuk menutupi kekurangan BBM dan kuota subsidi akan terus terkuras maka APBN akan mengalami defisit dan hal ini akan memicu guncangan perekonomian di berbagai sektor yang berhubungan dengan BBM. Harga minyak yang terus meningkat akan semakin menambah besarnya defisit APBN (Djunedi, 2008).

Penelitian lain yang dilakukan oleh Cahyadin et al., (2014) menemukan bahwa harga minyak dunia mempunyai hubungan yang positif dan signifikan terhadap inflasi dan PDB riil Indonesia, tetapi tidak signifikan dan mempunyai hubungan yang negatif terhadap nilai tukar riil Indonesia, harga minyak dunia juga mempunyai nilai kontribusi dalam mempengaruhi nilai inflasi, nilai tukar riil dan PDB riil Indonesia setelah periode pertama.

TINJAUAN LITERATUR

Teori Pengeluaran Pemerintah

Salah satu instrumen kebijakan fiskal adalah pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah adalah seluruh pembelian atau pembayaran barang dan jasa untuk kepentingan nasional seperti, pembelian persenjataan dan alat-alat

kantor pemerintah, pembangunan jalan dan bendungan, gaji pegawai negeri, angkatan bersenjata dan lainnya (Samuelson, 2001).

Menurut Mangkoesoebroto (2001:169) Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, dalam mengatur pengeluarannya, pemerintah harus mempertimbangkan berbagai pertimbangan, sehingga keputusan yang diambil mengenai pengeluaran dapat dilaksanakan tepat sasaran, baik untuk yang akan menikmati ataupun pihak lain yang terkena kebijakan tersebut.

Wagner mengemukakan pendapatnya dalam bentuk suatu hukum, akan tetapi dalam pandangannya tersebut tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan pertumbuhan pengeluaran pemerintah dan GNP yang dimaksud Wagner adalah perkembangan pengeluaran pemerintah secara realif sebagaimana teori Musgrave, maka hukum Wagner adalah sebagai berikut: Dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan perkapita meningkat secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat.

Hukum Wagner dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\frac{P_k PP_1}{PPK_1} < \frac{P_k PP_2}{PPK_2} < \dots < \frac{P_k PP_n}{PPK_n} \quad (1)$$

$P_k PP_1$ adalah pengeluaran pemerintah per kapita, PPK adalah pendapatan per kapita yaitu GDP/jumlah penduduk dan 1,2,...n adalah jangka waktu (tahun). Peacock dan Wiseman adalah dua orang yang mengemukakan teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang terbaik. Teori mereka didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut, sehingga teori Peacock dan Wiseman merupakan dasar dari teori pemungutan suara.

Harga Minyak Dunia dan Pengeluaran Pemerintah di Indonesia

Menurut Mankiw (2007:11) harga barang dan jasa bergerak dengan cepat untuk menyeimbangkan jumlah yang ditawarkan dan jumlah yang diminta, dengan kata lain bahwa pasar berada dalam kondisi ekuilibrium, sehingga harga setiap barang dan jasa terjadi ketika kurva permintaan dan penawaran berpotongan.

Menurut Case dan Fair (2003:318) harga merupakan variabel keputusan bagi perusahaan yang persaingannya tidak sempurna, perusahaan memiliki kekuatan pasar yang harus memutuskan bukan saja berapa yang akan diproduksi, bagaimana memproduksi dan berapa yang akan diminta di masing-masing pasar masukan (input) melainkan juga berapa harga keluaran (output) yang akan mereka tetapkan.

Secara umum harga minyak rill berpengaruh negative terhadap PDB rill sebagai ukuran pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan ketika harga minyak dunia mengalami *shock*, maka sector produksi dalam negeri terutama untuk sektor-sektor industri yang terkait dengan bahan bakar minyak juga akan mengalami *shock* sehingga memaksa produsen untuk melakukan *adjustment* produksi yang pada akhirnya berpengaruh terhadap output secara rill

Menurut Adekokum (2018) mengemukakan bahwa Fluktuasi harga minyak mempengaruhi kebijakan fiskal suatu negara, kenaikan harga minyak dunia memiliki hubungan terbalik dengan penerimaan pajak dari sumber non minyak.

Selain itu Septiawan (2016) menunjukkan harga minyak dunia merupakan sejumlah nilai moneter yang ditetapkan untuk satu barel minyak dalam dolar Amerika Serikat. Terdapat tiga jenis minyak yang sering diperdagangkan di dunia yaitu, Minyak WTI (*West Texas Intermediate*) untuk daerah Amerika, Minyak Brent untuk daerah Eropa dan Minyak Dubai untuk kawasan Timur Tengah. Penentuan harga minyak dilihat dari besarnya derajat *API* (*American Petroleum Institute*) dan kadar belerangnya.

Selanjutnya Farzanegan, (2011) menyatakan pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap guncangan harga minyak. Meningkatnya pengeluaran pemerintah akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendorong subsidi harga minyak dengan penurunan harga komoditas.

Secara tidak langsung peningkatan atau penurunan harga minyak akan mempengaruhi pengeluaran pemerintah, ketika harga minyak mengalami *Shock* akan mempengaruhi kondisi keuangan suatu negara terutama negara yang bertindak sebagai pengimpor, pemerintah akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan BBM untuk kegiatan produksi sehingga menambah pengeluaran pemerintah yang ditandai dengan defisitnya APBN (Kilian, 2009)

Penerimaan Pemerintah di Indonesia dan Harga Minyak Dunia

Menurut mangkoesebroto, (2001:181) Aspek penerimaan pemerintah diperlukan untuk membiayai pengeluaran pemerintah pada umumnya penerimaan pemerintah dapat dibedakan antara penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak.

Selanjutnya menurut Hill (2000: 65) gambaran penerimaan pemerintah didominasi oleh perubahan relatif pada tiga bidang utama yang penting, yaitu pendapatan dari minyak dan gas, pendapatan domestik yang lain (biasanya mengacu pada pendapatan domestik non minyak, NORD di Indonesia) dan bantuan luar negeri,

Sedangkan menurut Kilian dalam Ramadhani (2011:31), Pengaruh harga minyak dunia terhadap perekonomian setiap negara bisa saja berbeda, bagi negara pengekspor minyak, kenaikan harga minyak dunia memberikan pergerakan yang positif bagi perekonomian karena penerimaan meningkat seiring naiknya harga minyak dunia. Sedangkan bagi negara pengimpor minyak kenaikan harga minyak akan membuat pengeluaran meningkat untuk memenuhi kebutuhan minyak suatu negara. Kenaikan harga minyak akan memberikan dampak pada APBN suatu negara, pada negara pengekspor minyak kenaikan

harga minyak diiringi dengan peningkatan penerimaan pemerintahnya, kenaikan harga minyak akan memberikan dampak positif bagi perekonomian.

Peningkatan penerimaan pemerintah akan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara namun juga diikuti oleh meningkatnya pengeluaran pemerintah untuk membiayai segala kebutuhan suatu negara, konsumsi energi akan mengalami peningkatan sehingga meningkatkan permintaan seperti kebutuhan minyak mentah, permintaan yang tinggi akan meningkatkan harga minyak sesuai dengan hukum permintaan.

Pengeluaran Pemerintah dan Penerimaan Pemerintah di Indonesia

Ginting (2010) menemukan bahwa penerimaan dan pengeluaran pemerintah memiliki hubungan kausalitas jangka panjang, dimana peningkatan pengeluaran pemerintah akan mendorong meningkatnya penerimaan pemerintah.

Menurut Buchanan and Wagner (1978), Hubungan penerimaan pemerintah dan pengeluaran pemerintah terjadi melalui peningkatan pajak, ketika pajak dinaikkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi dalam pembelanjaan pemerintah dengan demikian, pemerintah akan membelanjakan seluruh pendapatannya, kenaikan belanja pemerintah akan menyebabkan pengeluaran pemerintah semakin tinggi. Hubungan antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah menjadi penentu apakah keuangan negara mengalami defisit atau surplus dan menjadi acuan untuk mengambil kebijakan fiskal oleh pemerintah.

Peningkatan penerimaan pemerintah selalu berhubungan negatif dengan pengeluaran pemerintah. Penerimaan pemerintah dari sektor pajak menjadi sumber utama dalam pembiayaan pengeluaran pemerintah dalam kegiatan perekonomian, penerimaan pemerintah juga sebagai cadangan devisa negara untuk menstabilkan nilai tukar.

Selanjutnya Narayan (2005) menyelidiki kausalitas antara pendapatan pemerintah dan pengeluaran pemerintah di sembilan negara Asia menggunakan pengujian batas dan F-test konvensional untuk memeriksa kausalitas granger. Hasilnya menunjukkan bahwa dalam jangka panjang Indonesia, Singapura, Sri Lanka terdapat hubungan signifikan antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini digolongkan kepada penelitian deskriptif dan asosiatif dengan menggunakan variabel Harga Minyak Dunia menggunakan data dari WTI (*West Texas Intermediate*), realisasi pengeluaran pemerintah di Indonesia dan realisasi penerimaan pemerintah di Indonesia yang diperoleh dari Statistik Indonesia Badan Pusat Statistik. Menggunakan data time series dari tahun 1987 sampai 2017.

Metode analisis yang digunakan yaitu *Vector Error Corection Model* (VECM) untuk melihat hubungan timbal balik antar variabel dalam jangka panjang. Untuk mengetahui bagaimana hubungan timbal balik antara variabel maka digunakan model VECM, dengan model sebagai berikut:

$$HMD_t = \sum_{i=0}^n a_i HMD_{t-i} + \sum_{i=0}^n \beta_i PP_{t-i} + \sum_{j=0}^n \beta_j PNP_{t-j} + u_{1t} \quad (2)$$

$$PNP_t = \sum_{i=0}^n a_i PNP_{t-i} + \sum_{i=0}^n \beta_i PP_{t-i} + \sum_{j=0}^n \beta_j HMD_{t-j} + u_{2t} \quad (3)$$

$$PP_t = \sum_{i=0}^n a_i PP_{t-i} + \sum_{i=0}^n \beta_i HMD_{t-i} + \sum_{j=0}^n \beta_j PNP_{t-j} + u_{3t} \quad (4)$$

Dimana HMD adalah harga minyak dunia, PNP adalah pengeluaran pemerintah dan PP adalah penerimaan pemerintah di Indonesia $t-i$ adalah lag, α, β adalah konstanta dan μ adalah error.

Defenisi Operasional

Tabel 1. Kausalitas Harga Minyak Dunia, Pengeluaran dan Penerimaan Pemerintah di Indonesia

Variabel	Defenisi
Harga Minyak Dunia	Perkembangan harga minyak mentah dunia. Data yang digunakan adalah harga minyak dunia yang diperoleh dari situs penyedia data <i>crude oil</i> menggunakan data tahunan dari tahun 1988-2017 dengan satuan pengukuran yang digunakan adalah US\$/barel
Pengeluaran Pemerintah	Mencerminkan total pengeluaran pemerintah yang disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), data yang digunakan adalah realisasi total pengeluaran pemerintah dalam milyar rupiah yang diperoleh dari Statistik Indonesia, Badan Pusat Statistik menggunakan data tahunan yaitu tahun 1988-2017.
Penerimaan Pemerintah	Pendapatan yang diterima secara langsung oleh negara dari berbagai sektor ekonomi yang tersusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), data yang digunakan adalah realisasi total penerimaan pemerintah dalam milyar rupiah yang diperoleh dari Statistik Indonesia, Badan Pusat Statistik menggunakan data tahunan yaitu 1988-2017.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Akar Root (Unit Root Test)

Uji akar root digunakan untuk melihat srasioneritas apakah data penelitian ini mengandung unit root atau tidak. Pengujian *lag* optimum ini sangat berguna untuk menghilangkan masalah autokorelasi dalam sistem VAR. Sehingga dengan digunakannya *lag* optimal diharapkan tidak muncul lagi masalah autokorelasi

Pada data penelitian ini menggunakan data time series sehingga kita menggunakan uji akar unit root untuk data time series. Apabila data pada

penelitian ini tidak stasioner, maka kita dapat menstasionerkan data pada tingkat 1st *difference* dan 2nd *difference*, penelitian ini stasioner pada tingkat 1st *difference*.

Lag Optimal

Lag optimum digunakan untuk menentukan jumlah lag yang akan digunakan dalam penelitian ini. Penentuan jumlah lag optimum sangat diperlukan untuk melakukan uji kointegrasi dan *granger causality* agar kita memperoleh hasil yang lebih baik. Penentuan jumlah lag dalam model VAR ditentukan pada kriteria informasi yang direkomendasikan oleh *Final Prediction Error* (FPE), *Aike Information Criterion* (AIC), *Schwarz Criterion* (SC), dan *Human-Quinn* (HQ). Tanda bintang pada hasil olahan menunjukkan lag optimal yang direkomendasikan oleh kriteria tersebut, Penelitian ini menggunakan lag keempat karena kriteria nilai AIC dan SIC terkecil berada pada lag keempat.

Hasil Uji Kausalitas Granger

Penelitian ini menggunakan hasil uji pada stasioner tingka *first difference*, menggunakan lag 4 dengan uji kausalitas Granger dengan data saling terkointegrasi dalam jangka panjang maka menggunakan analisis *Vector Error Correction Model* (VECM).

Hasil kausalitas Granger yang terdapat pada tabel 4. Menunjukkan bahwa dari keseluruhan variabel yang diuji dengan tingkat keyakinan 95 persen variabel harga minyak dunia memiliki hubungan kausalitas dengan pengeluaran pemerintah di Indonesia, sedangkan harga minyak dunia tidak memiliki hubungan kausalitass maupun hubungan satu arah dengan penerimaan pemerintah di Indonesia dan pengeluaran pemerintah tidak memiliki hubungan kausalitas maupun hubungan satu arah dengan penerimaan pemerintah di Indonesia.

Tabel 2. Hasil Uji Kausalitas Granger

Pairwise Granger Causality Tests			
Sample: 1988 2017			
Lags: 4			
Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Prob
D(PNP) does not Granger Cause D(HMD)	24	4.03074	0.0205
D(HMD) does not Granger Cause D(PNP)		17.8422	1.E-05
D(PP) does not Granger Cause D(HMD)	24	1.00997	0.4332
D(HMD) does not Granger Cause D(PP)		1.07981	0.4012
D(PP) does not Granger Cause D(PNP)	24	0.07589	0.9886
D(PNP) does not Granger Cause D(PP)		1.07681	0.4005

Sumber Data diolah 2018

Kausalitas Antara Harga Minyak Dunia dan Pengeluaran Pemerintah di Indonesia

Berdasarkan hasil uji Kausalitas Granger dapat diketahui bahwa harga minyak dunia memiliki hubungan kausalitas dengan pengeluaran pemerintah di Indonesia disebabkan meningkatnya pengeluaran pemerintah dalam memenuhi kuota subsidi BBM yang langsung di biayai oleh APBN negara

Indonesia, tinggi rendah nya harga minyak dunia mempengaruhi pengeluaran pemerintah di Indonesia, ketika harga minyak dunia naik, pengeluaran pemerintah juga ikut naik, karena ditekan oleh sektor industri dan rumah tangga produksi dalam pemenuhan kebutuhan subsidi BBM, sehingga pengeluaran akan meningkat bahkan mencapai defisit anggaran, ketika harga minyak turun pengeluaran pemerintah justru dialihkan untuk pembangunan infrastruktur.

Naiknya harga minyak juga turut mempengaruhi kondisi perekonomian, yaitu terjadinya inflasi harga-harga komoditas dan harga-harga barang pokok, karena minyak merupakan kebutuhan vital dalam proses produksi dan transportasi, untuk mengendalikan hal tersebut pemerintah meningkatkan pengeluarannya untuk memenuhi kebutuhan minyak masyarakat dengan subsidi BBM.

Berdasarkan data dari tahun 2010 sampai 2012 harga minyak dunia selalu mengalami kenaikan yang signifikan sedangkan pengeluaran juga mengalami peningkatan setiap tahunnya sehingga harga minyak dunia dan pengeluaran pemerintah saling mempengaruhi dan berhubungan positif, sehingga harga minyak dunia dan pengeluaran pemerintah saling mempengaruhi dalam jangka panjang.

Hal ini juga sejalan dengan penelitian Kiliian, (2009) menunjukkan secara tidak langsung peningkatan dan penurunan harga minyak dunia akan mempengaruhi pengeluaran pemerintah, ketika harga minyak mengalami *shock* akan mempengaruhi kondisi keuangan suatu negara terutama negara yang bertindak sebagai pengimpor, pemerintah akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan BBM untuk kegiatan produksi sehingga menambah pengeluaran pemerintah yang ditandai dengan desfisitnya APBN.

Kausalitas Antara Harga Minyak Dunia dan Penerimaan Pemerintah di Indonesia

Berdasarkan hasil uji Kausalitas Granger dapat diketahui bahwa harga minyak dunia tidak memiliki hubungan kausalitas dan hubungan satu arah dengan penerimaan pemerintah di Indonesia hal ini disebabkan oleh penerimaan pemerintah Indonesia lebih dari 50 persen berasal dari penerimaan non migas sedangkan penerimaan dari sektor migas dari tahun ke tahun semakin menurun, ini menunjukkan kenaikan harga minyak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pemerintah karena saat ini Indonesia sebagai pengimpor minyak dari negara lain. Pada tahun 1990 an Indonesia sempat menjadi pengekspor minyak bumi terbesar di Asia Tenggara sehingga pada krisis moneter tahun 1998 Indonesia tidak terlalu terkena dampaknya karena pada saat itu terjadinya *booming Oil*, namun pada awal tahun 2000 an Indonesia keluar dari OPEC dan Indonesia bertindak sebagai negara pengimpor dan konsumsi energi migas terbesar, sehingga penerimaan pemerintah dari sektor migas semakin menurun bahkan pemerintah meningkatkan pengeluaran nya saat harga minyak dunia naik untuk mengendalikan perekonomian dari inflasi.

Hal ini sejalan dengan penelitian Kiliian, (2009) menunjukkan bahwa pengaruh harga minyak dunia dalam setiap negara berbeda, bagi negara pengekspor minyak, kenaikan harga minyak dunia memberikan pengaruh positif

bagi perekonomian karena meningkatnya penerimaan pemerintah seiring dengan meningkatnya harga minyak dunia, sedangkan bagi negara pengimpor kenaikan harga minyak dunia akan meningkatnya pengeluaran pemerintah untuk memenuhi kebutuhan minyak

Kausalitas Antara Pengeluaran Pemerintah dengan Penerimaan Pemerintah di Indonesia

Berdasarkan hasil uji Kausalitas Granger dapat diketahui bahwa Pengeluaran Pemerintah tidak memiliki hubungan kausalitas dan hubungan satu arah dengan penerimaan pemerintah di Indonesia hal ini disebabkan oleh besarnya penerimaan pemerintah saja, di Indonesia ketika penerimaan pemerintah meningkat maka pengeluaran juga semakin meningkat bahkan melebihi penerimaan pemerintah dan menyebabkan anggaran sering defisit, walaupun penerimaan pemerintah menurun pengeluaran pemerintah selalu meningkat karena pemerintah berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan negaranya, sehingga utang luar negeri menjadi salah satu cara untuk menutupi kekurangan tersebut.

Sebagian besar penerimaan pemerintah Indonesia berasal dari PNBPN sedangkan distribusi pengeluaran Indonesia terbesar di pengaruhi oleh sektor migas untuk sektor produksi dan transportasi.

Hal ini tidak sejalan dengan dengan penelitian Buchanan dkk, (1978) menunjukkan hubungan penerimaan dan pengeluaran pemerintah terjadi melalui peningkatan pajak, ketika pajak dinaikkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi dalam pengeluaran pemerintah dengan demikian pemerintah akan membelanjakan seluruh pendapatannya, kenaikan belanja pemerintah akan menyebabkan pengeluaran pemerintah semakin tinggi.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis pada perhitungan VECM maka dapat disimpulkan penelitian ini menunjukkan bahwa (1). harga minyak dunia dan pengeluaran pemerintah memiliki hubungan kausalitas. (2). harga minyak dunia tidak memiliki hubungan kausalitas maupun hubungan satu arah. (3). pengeluaran pemerintah tidak memiliki hubungan kausalitas maupun hubungan satu arah.

DAFTAR RUJUKAN

- Adekokum, A. 2018. The Effect of Oil Shock on Government Expenditure and Government Revenue Nexus in Nigeria (with exogeneity restrictions). Nigeria Obafemi Awolowo University. *Future Business Journal*. Vol 4. No 219-232 2018
- Ariefianto, Moch, Doddy. 2012. *Ekonometrika, Esensi Dan Aplikasi Dengan Menggunakan Eviews*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Badan Pusat Statistik. 1988. *Statistik Indonesia 1988*, BPS.
- _____. 2000. *Statistik Indonesia 2000*, BPS.
- _____. 2005. *Statistik Indonesia 2005*, BPS
- _____. 2010. *Statistik Indonesia 2010*, BPS.
- _____. 2015. *Statistik Indonesia 2015*, BPS.

- _____. 2017. *Statistik Indonesia 2017*, BPS.
- Bank Indonesia. 2000. *Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia 1988-2000*. Di akses pada 29 September 2018. (<http://www.bi.go.id>).
- _____. 2017. . *Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia 2000-2017*. Di akses pada 29 September 2018. (<http://www.bi.go.id>).
- Case, K. E dan Fair, R. C. 2003. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Makro Edisi Ketujuh*. Gramedia: PT Indeks
- Dizaji, S.F. 2014. The Effect of Oil Shock on Government Expenditure Government Revenues Nexus (With Application to Iran's Sanction). *Economc Modelling*.
- Djunedi, P. 2008. *Naiknya Harga Minyak dan Antisipatif APBN*. Peneliti Badan Kebijakan Fiskal Majalah Warta Anggaran No.9
- Dumairy, P. 2011. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga
- Ekananda, M. 2016. *Analisis Ekonometrika Time Series*. Jakarta: PT Media Global Edukasi.
- Farzanegan, M. R. 2011. Oil Revenue Shock and Government Spending Behavior in Iran. *Journal of Enegry Economics*.
- Ginting, R. S. 2010. Analisis Kausalitas Antara Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi publik*
- Hernawan. R. 2008. *Analisis Kausalitas antara Harga Minyak Dunia dengan Inflasi Dunia Tahun 1980-2005*. Muhammadiyah Surakarta
- Hill, Hall. 2000. *Ekonomi Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kiliian, 2009. *Oil priceshocksandstockmarketreturns: New evidencefromthe United States and China*. UniversityofSurreyUK
- Machmud, A. 2016. *Perekonomian Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Erlangga
- Mangkoesobroto, G. 2001. *Ekonomi Publik Edisi Ketiga*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Mankiw, N. G. 2007. *Makroekonomi Edisi Keenam*. Jakarta: Erlangga.
- Narayan, P. K. 2005. The Government Revenue and Government Expenditure nexus: Empirical Evidence from Nine Asian Countries. *Journal of Asian Economics*.
- Nizar, M, A. 2012. *Dampak Fluktuasi Harga Minyak Dunia Terhadap Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Pusat Kebijakan Ekonomi, Makro Badan Kebijakan Fiskal dan Kementrian Keuangan RI.
- Pndyck, R. S dan Rubinfeld, D. L. 2009. *Mikroekonomi Edisi Keenam*. Jakarta: PT Indeks.
- Putra, H. E. 2016. *Pengaruh Harga Minyak Dunia, Nilai Tukar, Pengeluaran Pemerintah dan Ekspor Netto Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indnesia Tahun 1985-2014*. Surabaya: Universitas Airlangga
- Ratnah, S. 2015. *Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Defisit APBN Indonesia*. Makassar: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
- Rosit, H. 2010. *Analisi Kausalitas Asumsi APBN terhadap APBN di Indonesia*. Medan: FE USU

Samuelson, P. A dan Nordhaus, W. D. 2001. *Ilmu Makroekonomi Edisi Keempat belas*. Jakarta: PT Media Global Edukasi